

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh dari Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Ukuran Daerah yang diproksi dengan Total Aset, tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_1$  ditolak.
2. Tingkat Kekayaan Daerah yang diproksi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_2$  ditolak.
3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang diproksi dengan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_3$  ditolak.
4. Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_4$  diterima.
5. Opini Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_5$  ditolak.

6. Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Modal dan Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2012-2014, maka  $H_0$  diterima.

## 5.2 Saran

Didasarkan dari hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian berikutnya, melihat pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen masih kecil, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti menambahkan variabel lainnya seperti Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang juga termasuk pendapatan suatu daerah selain PAD dan Dana Alokasi Umum.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diganti dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Keserasian.
3. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian agar lebih representatif.